

**DOKUMEN RENSTRA**  
**DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI**  
**2023-2026**



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Hidayahnya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (RESTRA) Dinas Pertanian Kota Kendari Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan. Dokumen RENSTRA disusun dengan pedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah (RPJMP Nasional/Daerah). Disamping itu, dalam RESTRA ini memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah dan program rencana kerja dalam rangka revitalisasi pembangunan pertanian Kota Kendari yang disesuaikan dengan potensi yang diarahkan pada sistem ketahanan pangan dan pengembangan sistem agribisnis.

Tentu saja RENSTRA ini baik dari segi teknis penyusunan maupun materi masih jauh dari harapan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan demi penyempurnaan kedepan.

**Kendari, Maret 2022**

Kepala Dinas,



Ir. H. ST. GANEF, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19630918 199103 2 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	
1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	4
1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	
Dinas Pertanian Kota Kendari	6
2.1.1. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.1.2. Tupoksi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat daerah Dinas Pertanian Kota Kendari	11
2.2.1. Sumber Daya Manusia	11
2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Dinas Pertanian Kota Kendari	
2.3.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja (Tahun 2018 – 2022)	14
2.3.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah	17
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
Perangkat daerah Dinas Pertanian Kota Kendari	18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan	
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	21
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	25
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	25
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	27
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
BAB VIII PENUTUP	41

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana strategis (Renstra) pada hakikatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategis atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumberdaya termasuk modal dan sumberdaya manusia dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Fungsi dokumen Renstra bagi sebuah organisasi / lembaga adalah :

1. Sebagai pedoman dasar arahan untuk prioritas program dan kegiatan tahunanyang akan dilaksanakan dan dibiayai sesuai dengan skala dan kebutuhan prioritas.
2. Sebagai tolak ukur dan alat kontrol dalam penilaian kinerja organisasi atau lembaga.

Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. DokumenRenstra disusun dengan pedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah (RPJMP Nasional/Daerah) termasuk visi misi walikota terpilih dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan RPJMN.
- b. Renstra daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebuah Pembangunan pertanian sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan khususnya di Kota Kendari masih mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Peran dimaksud adalah peningkatan PDRB, penyediaan pangan, penyediaan bahan bangunan/bahan baku industry, penyediaan kesempatan kerja dan berusaha, peluang ekspor,peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat.

Arah pembangunan pertanian kota kendari sebagai penjabaran dari kebijakan pembangunan pertanian secara nasional yang difokuskan pada revitalisasi pembangunan pertanian yang disesuaikan dengan potensi objektif wilayah mencakup; daya dukung lahan, tenaga kerja, sosial ekonomi, pasar modal, teknologi serta kultur masyarakat setempat.

Revitalisasi pembangunan pertanian wilayah kota kendari diarahkan pada sistem ketahanan pangan dan pengembangan sistem agribisnis yang berbasis pada keragaman sumber bahan pangan, kelembagaan, dan budaya lokal dalam rangka mendukung ketersediaaannya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau, dengan memperhatikan peningkatan

pendapatan petani, peningkatan produksi yang berkesinambungan serta mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, Inovatif dan amanah sebagai pelaku utama pembangunan pertanian di Kota Kendari dan mampu menghasilkan teknologi spesifik lokasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.

Berdasarkan pada fokus pembangunan tersebut, maka tujuan pembangunan pertanian kota kendari adalah disamping meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani/pelaku agribisnis dalam kondisi tumbuh kembangnya agribisnis kota yang berdaya saing sesuai dengan keunggulan komperatif secara berkelanjutan berkeadilan dan demokrasi..Hal ini dapat terwujud apabila adanya politicalwill dari pemerintah dan pemerintah daerah serta dukungan dari komponen masyarakat yang terkait.

Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan sekarang ini dan perlu dipecahkan kedepan melalui program/kegiatan pembangunan adalah bagaimana melaksanakan pelayanan prima guna mewujudkan kondisi pertanian yang tangguh, modern dan efisien.

Untuk ini dengan melihat permasalahan yang dihadapi dan upaya yang akan dilaksanakan serta mengingat kondisi dan pentingnya peranan pembangunan pertanian dalam mendukung pembangunan kota kendari, maka dipandang perlu membuat rencana strategi berupa program kerja pembangunan pertanian kota kendari tahun anggaran 2023-2026. Program kerja ini secara substansional ditujukan dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan pertanian dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan dengan memperhitungkan faktor pendanaan dan skala prioritas.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Kendari mengacu pada aturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
12. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan;
13. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010 – 2030;
22. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 tahun 2012 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2012 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Kendari No. 1 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025.
25. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari.
26. Peraturan Wali Kota No 14 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Kendari
27. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari 2023 - 2026

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota Kendari Tahun 2023-2026 adalah dokumen yang membuat program Strategis dan tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan pertanian yang hendak dicapai sebagaimana tersirat pada komitmen Visi dan Misi yang telah disepakati. Pelaksanaan Program Strategis mengedepankan skala prioritas kegiatan yang esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat tani dan pelaku usaha dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran pembiayaan yang sumbernya berasal dari APBD.

#### **1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra**

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota Kendari Tahun 2023-2026 sebagai panduan terhadap pelaksanaan kegiatan 4 tahun kedepan, agar tercipta tertib, pelaksanaan sebagaimana rencana program sehingga memberi arah dan kepastian pelaksanaan kegiatan menuju tahapan pembangunan pertanian yang berkelanjutan guna tercapainya petani mandiri.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Kendari

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

##### **1.1. LATAR BELAKANG**

##### **1.2. LANDASAN HUKUM**

##### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

###### **1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**

###### **1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**

##### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI

### 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota Kendari

#### 2.1.1. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

#### 2.1.2. Tupoksi Perangkat Daerah

### 2.2. Sumber Daya Perangkat daerah Dinas Pertanian Kota Kendari

#### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

#### 2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Dinas Pertanian Kota Kendari

#### 2.3.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja (Tahun 2018 – 2022)

#### 2.3.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

### 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah Dinas Pertanian Kota Kendari

## BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

### 3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

### 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## BAB VIII PENUTUP

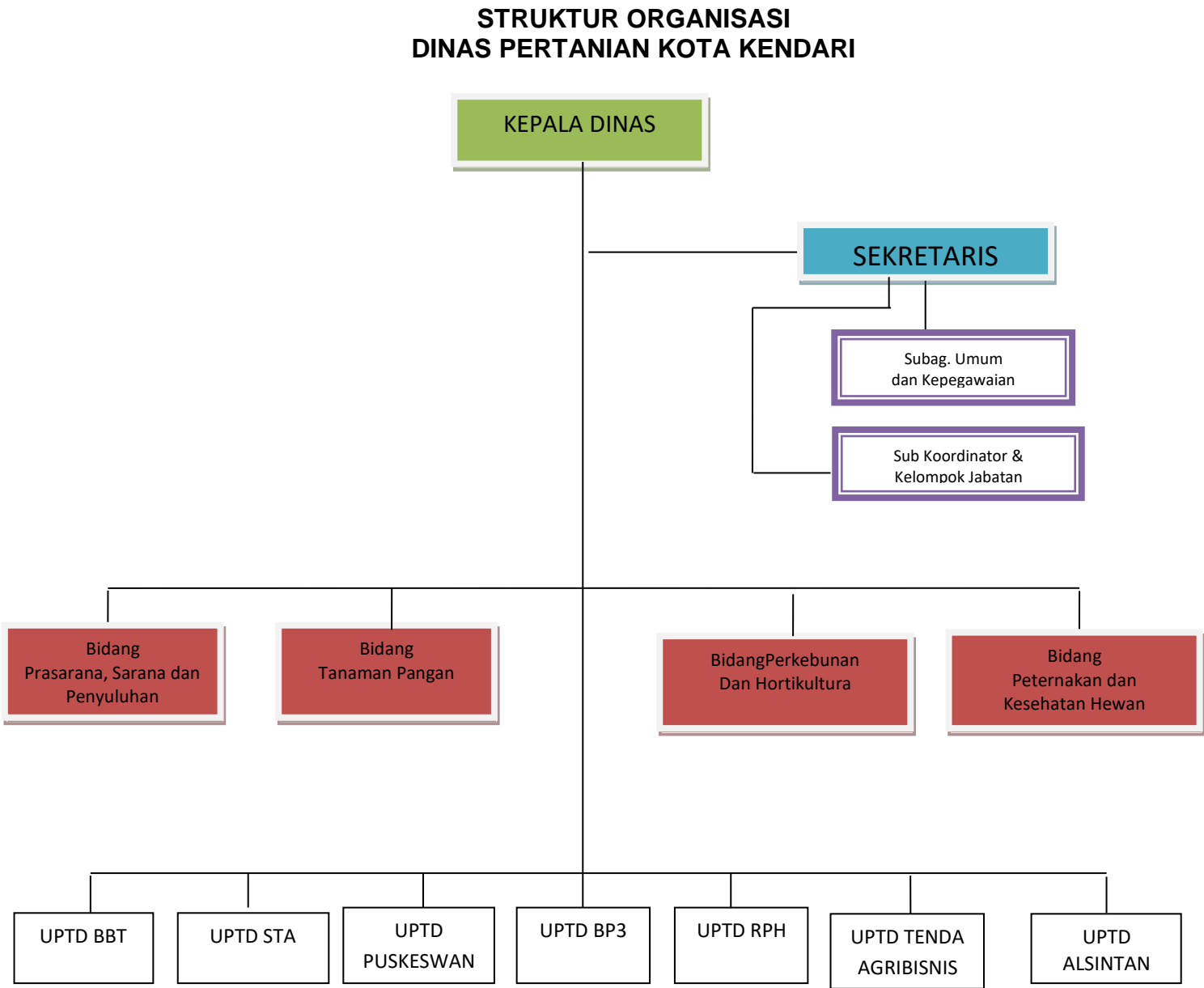


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota Kendari

2.1.1. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota Kendari



2.1.2. Tupoksi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota Kendari

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2022, Dinas Pertanian Kota Kendari terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :
  - Kelompok Jabatan Fungsional

- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Perkebunan dan Hortikultura
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi Dinas Pertanian dijabarkan melalui Peraturan Walikota Kendari Nomor 14 tahun 2022 sebagai berikut ;

#### **A. Tugas dan fungsi Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari**

##### **1. Tugas**

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemantuan di bidang pertanian

##### **2. Fungsi**

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana,program dan anggaran dinas
- b. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana,tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluh pertanian
- c. Penyusunan programa penyuluhan pertaanian
- d. Pengembanagan prasarana pertanian
- e. Pengaawasan mutu,peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
- f. Pengawasan penggunaan sarana pertanian
- g. Pembinaan produksi bidang pertanian
- h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit tanaman
- i. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam
- j. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
- k. Pelaksanaan penyuluhan pertanian
- l. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian
- m. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian
- n. Pelaksanaan administrasi dinas pertanian
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsi dinas

#### **B. Tugas dan Fungsi Sekertaris**

##### **1. Tugas**

Melaksanakan urusan administrasi umum menyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan rumah tangga, pemeliharaan kantor, penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan

##### **2. Fungsi**

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran
- b. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

- c. Penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai
  - d. Penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan
  - e. Penyusunan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur
  - f. Perawatan barang inventaris dan perlengkapan
  - g. Pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai, penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan, penyusunan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur perawatan barang, inventaris dan perlengkapan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.
  - Susunan organisasi bidang sekretariat terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian dan kelompok jabatan fungsional.

### **C. Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana, sarana dan penyuluhan**

#### **1. Tugas**

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana sarana dan penyuluhan

#### **2. Fungsi**

- a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian
- b. Penyediaan dukungan fasilitasi pengembangan dan pembinaan teknis prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani
- d. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan metode serta penyebaran informasi pertanian
- e. Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian PNS, Swadaya dan swasta serta honorer/THL-TBPP
- f. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian dan fasilitasi investasi pertanian
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana, prasarana dan penyuluhan pertanian

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Susunan organisasi bidang prasarana sarana dan penyuluhan terdiri dari kelompok jabatan fungsional

#### C. Tugas dan fungsi bidang Tanaman Pangan

##### 1. Tugas

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang tanaman pangan

##### 2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional bidang tanaman pangan
- b. Pelaksanaan kegiatan produksi tanaman pangan
- c. Pelaksanaan bintek pengolahan hasil pemasaran tanaman pangan
- d. Pelaksanaan manajemen usaha tanaman pangan dan sumber lahan pertanian
- e. Pengkoordinasian rencana pembinaan dan produksi tanaman pangan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pembenihan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi bidang tanaman pangan terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

#### D. Tugas dan Fungsi Bidang Perkebunan dan Hortikultura

##### 1. Tugas

Melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perkebunan dan hortikultura

##### 2. Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan dan hortikultura.
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan dan hortikultura.
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan dan hortikultura pemberian bimbingan teknis dan penerapan peningkatan produksi dibidang perkebunan dan hortikultura
- d. Pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit serta dampak perubahan iklim di bidang perkebunan dan hortikultura
- e. Pemberian rekomendasi teknis dibidang perkebunan dan hortikultura
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi bidang perkebunan dan hortikultura terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

#### E. Tugas dan Fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

### 1. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan

### 2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan
- b. Pengolahan penyiapan bahan perumusan
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pemasaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan
- e. Pelaksanaan pengawasan dan peredaran hewan
- f. Pelaksanaan bimtek pengawasan dan pengendalian obat dan pakan ternak
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi lainnya.
  - Susunan organisasi bidang peternakan dan kesehatan hewan terdiri dari kelompok jabatan fungsional

## **F. Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari UPTD Kelas A dan UPTD Kelas B**

### **G. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang keahliannya
- Jabatan fungsional dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya
- Sub koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya
- Sub koordinator membantu pimpinan menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian pemaantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi kelompok substansi dan sub koordinator ditetapkan dengan keputusan Walikota

## **2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Didalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pertanian didukung oleh sumber daya manusia. Potensi sumber daya manusia Dinas Pertanian dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1  
Potensi sumber daya manusia PNS/Non PNS Dinas Pertanian Kota Kendari

No	Jabatan	Esel on	Pangkat / Gol.	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelami n
				S M A	D3	S1	S2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Dinas	II.b	Pembina Utama Muda, IV/c	1			1	P
2	Sekretaris	III.a	Pembina TK.I, IV/b			1		L
3	Kepala Bidang Tanaman Pangan	III.b	Pembina, IV/a			1		L
4	Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura	III.b	Penata, III/c				1	L
5	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	III.b	Pembina, IV/a				1	L
6	Kepala Bidang Prasarana,Sarana Penyuluhan	III.b	Pembina, IV/a				1	L
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	IV.a	Pembina, IV/a				1	P
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	IV.a	Penata TK.I, III/d					P
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV.a	Penata, III/d			1		P
10.	Kepala Seksi Keswan Pengolahan dan Pemasaran	IV.a	Penata Tk.I, III/d			1		L
11.	Kepala Seksi Perbibitan Produksi	IV.a	Penata, III/d			1		P
12.	Kepala Seksi Pengawasan/Pengendalian Hewan,Obat dan Pakan	IV.a	Penata, III/c				1	L
13.	Kepala Seksi Produksi dan Perbenihan	IV.a	Penata Tk. I, III/d			1		P
14.	Kepala Seksi Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran	IV.a	Penata, III/c			1		L
15.	Kepala Seksi Pengawasan Mutu, Peredaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	IV.a	Penata Tk. I, III/d				1	P

16.	Kepala Seksi Produksi dan Perbenihan	IV.a	Penata Tk.I, III/d			1	1	P
17.	Kepala Seksi Pengawasan Mutu,Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	IV.a	Pembina, IV/a					P
18	Kepala Seksi Perlindungan Pengolahan dan pemasaran Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	IV.a	Penata, III/c			1		L
19.	Kepala Seksi Kelembagaan,Ketenagaan Metode dan Informasi	IV.a	Penata, III/c			1		P
20.	Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi	IV.a	Penata Tk.I, III/d			1		P
21.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	IV.a	Penata, III/c			1		L
21.	Kepala UPTD Balai Benih Tanaman	IV/a	Penata, III/c			1		L
22.	Ka. TU UPTD Balai Benih Tanaman	IV/b	Penata, III/c			1		L
23.	Kepala UPTD Sub Terminal Agribisnis	IV/a	Penata Tk.I, III/d			1		L
24.	Ka. TU UPTD Sub Terminal Agribisnis	IV/b	Penata Tk.I, III/d			1	1	P
25.	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan	IV/a	Penata Tk.I, III/d					I
26.	Ka. TU UPTD Rumah Potong Hewan	IV/b	Penata, III/c			1		L
25.	Kepalan UPTD Tenda Agribisnis	IV/a	Penata, III/c			1		L
26.	Ka. TU Tenda Agribisnis	IV/b	Penata, III/c			1		P
27.	Kepala UPTD BP3	IV/a	Penata Tk.I, III/d				1	L
28.	Ka. TU UPTD BP3	IV/b	Penata Tk.I, III/d					L
29.	Kepala UPTD Puskesmas KEPALA	IV/a	Penata Tk.I, III/d			1		L
30.	Ka TU UPTD Puskesmas	IV/b	Penata Muda, III/a			1		L
31.	Koordinator Jabatan Fungsional							
32.	Staf PNS							

33	Staf Non PNS							
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--

**2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Berdasarkan aset atau modal yang ada di Dinas Pertanian dapat di golongkan dalam beberapa jenis/ macam antara lain :

- 1) Alat roda empat = 3 Unit
- 2) Alat roda dua = 91 Unit
- 3) Traktor roda empat = 4 unit
- 4) Traktor roda dua = 26 Unit
- 5) Cultivator = 12 Unit
- 6) Rice Transplanter = 3 Unit
- 7) Pompa air = 12 Unit
- 8) Embung Pertanian = 10 Unit
- 9) Irigasi tanah dangkal = 18 Unit
- 10) Irigasi tanah dalam = 8 Unit
- 11) Dam Parit = 2 Unit
- 12) Jalan Usaha Tani Pertanian = 10 Km
- 13) Gedung UPTD = 3 Unit
- 14) Gedung BPP = 6 Unit

**Potensi dan Penggunaan Lahan Pertanian**

- 1. Pertanian, Tanaman Pangan
  - Potensi Lahan sawah sekitar 528 Ha dan luas tanaman palawija sebesar 950 Ha .
- 2. Perkebunan
  - Dari luas areal untuk tanaman perkebunan sebesar 1426,1 Ha dengan produksi sebesar 1038,1 ton
- 3. Potensi Pengembangan Peternakan
  - Pengembangan populasi ternak besar seperti sapi, kerbau dan kuda relatif masih tersedia daya dukung lahan seperti padang rumput seluas ±255 Ha, tersebar di 15 (lima belas) wilayah kelurahan, yaitu : kelurahan baruga 50 Ha, Kel.Matabubu 10 Ha, Kel.Anggoya 10 Ha, Kel.Rahandaouna 10 Ha, Kel. Andaonuhu 5 Ha, Kel. Abeli 15 Ha, Kel. Anggalo Melai 15 Ha, Petoaha 15 Ha, Kel. Nambo 20 Ha, Kel. Sambuli 10 Ha, Kel. Tondonggeu 10 Ha, Kel. Watulondo 20 Ha, Kel. Puuwatu 15 Ha, Kel. Abeli dalam 30 Ha, Kel. Labibia 20 Ha.
  - Untuk pengembangan populasi ternak kecil dan unggas dikota kendari masih memungkinkan dan prespektif mengingat lahan cukup tersedia
  - Sebagai gambaran bahwa jumlah populasi ternak dikota kendari s/d 2021 adalah sapi 4.568 ekor, kerbau 30 ekor, kuda 3 ekor,k ambing 4.560 ekor, babi 23 ekor,ayam buras 724.556 ekor, ayam ras petelur 22.463 ekor,



ayam ras pedaging 1.050.457 ekor, itik 3361 ekor, manila 1090 ekor dan puyuh 1.694 ekor.

Keadaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

- Jumlah kelompok tani 441 klp tersebar di 11 wilayah kecamatan di 64 kelurahan
- Jumlah Gapoktan sebanyak 57 kelompok yang tersebar di 10 wilayah kecamatan

## **2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI**

### **2.3.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja (Tahun 2018 – 2022)**

Untuk mengetahui evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Kendari tahun 2018-2022 diuraikan pada Tabel 2.2

TABEL. 2.2  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN  
KOTA KENDARI

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		√		11.830.835.122	12.428.633.908	15.405.923.193	17.685.517.177	19.965.598.243	1.748.515.000	1.196.694.500	862.850.440	11.350.728.869		14,78	9,63	5,60	0,00	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		√		2.670.928.213	3.142.268.486	3.696.786.454	4.349.160.534	5.001.534.614	370.000.000	776.970.000	11.578.750	1.686.194.216		13,85	24,73	0,31	0,00	
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasana Pertanian		√		2.802.606.112	3.297.183.661	3.879.039.602	4.563.576.002	5.248.112.402	1.753.500.000	1.853.026.140	170.558.600	269.500.010		62,57	56,20	4,40	0,00	
4	Program Pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner		√		220.461.392	220.461.392	259.366.344	305.136.875	350.907.406	100.000.000	39.415.000	14.221.250	20.774.300		45,36	17,88	5,48	0,00	
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		√		60.913.523	71.662.969	84.309.375	99.187.500	114.065.625	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Program Perijinan Usaha Pertanian		√		12.356.195	14.536.700	17.102.000	20.120.000	23.138.000	0	0	0	7.120.000		0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Program Penyuluhan Pertanian		√		1.778.819.925	2.092.729.324	2.462.034.499	2.896.511.175	3.330.987.851	922.800.000	890.552.650	55.680.750	342.382.863		51,88	42,55	2,26	0,00	

Catatan:  
Tabel ini diisi dengan indikator, target dan realisasi indikator yang ada dalam renstra sebelumnya  
- Tabel rasio diisi dengan rumus  
realisasi/anggaran x 100

2.3.2. Indikator Kinerja PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui evaluasi kinerja yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Kendari tahun 2018-2022 diuraikan pada Tabel 2.3

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN  
KOTA KENDARI

Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun Ke- (Dalam Ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Dalam Ribuan)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (Rp)	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.748.515.000	1.196.694.500	862.850.440	11.350.728.869		1.644.874.827	1.099.847.840	769.275.009	10.604.940.983		5,93	8,09	10,84	6,57		6.645.742.157,25	6.165.232.921,75
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	370.000.000	776.970.000	11.578.750	1.686.194.216		239.986.250	25.720.000	7.860.000	1.599.225.350		35,14	96,69	32,12	5,16		1.580.097.304,00	673.372.587,50
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasana Pertanian	1.753.500.000	1.853.026.140	170.558.600	269.500.010		1.733.425.400	1.650.654.200	35.220.000	127.900.000		1,14	10,92	79,35	52,54		3.844.459.742,50	3.451.274.600,00
Program Pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	100.000.000	39.415.000	14.221.250	20.774.300		100.000.000	39.415.000	14.102.500	18.924.300		0	0	0,84	8,91		158.829.825,00	158.248.575,00
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
Program Perijinan Usaha Pertanian	-	-	-	7.120.000		-	-	-	7.120.000		-	-	-	0		-	-
Program Penyuluhan Pertanian	922.800.000	890.552.650	55.680.750	342.382.863		922.800.000	819.970.400	38.687.500	327.506.250		0	7,93	30,52	4,35		1.954.629.115,75	1.863.334.462,50

Catatan:  
- Tabel ini diisi dengan anggaran, target dan realisasi anggaran yang ada dalam renstra sebelumnya  
- Tabel rasio diisi dengan rumus realisasi/anggaran x 100

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI**

Berdasarkan data pencapaian Kinerja, Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pertanian Kota Kendari selama kurun waktu 2023-2026 diperhadapkan pada berbagai tantangan, namun juga ditemukan beberapa permasalahan, tantangan dan peluang, secara jelas diuraikan sebagai berikut :

### **A. Permasalahan**

1. Menurunnya kualitas lingkungan serta kondisi iklim yang tidak menentu

Menurunnya produksi pertanian sangat erat dengan perubahan iklim dan berakibat terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya kekeringan. Dampak lanjutan dari keadaan iklim yang tidak menentu adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati serta munculnya hama dan penyakit tanaman dan hewan.

2. Ketersediaan sarana dan prasarana relatif masih terbatas

Salah satu sarana pertanian yang saat ini keberadaannya masih terbatas di Kota Kendari adalah jaringan irigasi teknis serta adanya jaringan irigasi setengah teknis dan swadaya mengalami kerusakan akibat banjir dan erosi. Prasarana usaha tani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat pedagang komoditas pertanian adalah jalan usaha tani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi pergudangan berpendingin udara, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan kandang untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, Disisi sarana produksi dan sarana pengawasan permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestidida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian, belum berkembangnya kelembagaan penyedia sarana produksi, serta kurangnya sumber daya manusia yang profesional, kreatif, Inovatif dan amanah sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.

3. Status dan luas kepemilikan lahan

Dari sisi skala penguasaan lahan pertanian di Kota Kendari dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan untuk pemukiman dan fasilitas umum.

Dari segi status kepemilikan lahan, sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh modal usaha.

4. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga kredit usaha tani. Hal ini diakibatkan tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan.
5. Belum optimalnya kelembagaan petani

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya, sehingga berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, dan belum sepenuhnya diarahkan

untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usaha tani. Disisi lain, koperasi usaha tani belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani.

6. Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik.

Pola konsumsi pangan masyarakat kota masih didominasi oleh beras. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan beras untuk konsumsi masyarakat akan semakin bertambah, dan apabila keadaan ini terus berlangsung dan tidak ada upaya diversifikasi pangan akan mengancam ketahanan pangan.

7. Masih rendahnya nilai tukar petani (NTP)

Petani kota kendari pada umumnya tidak memiliki modal besar dengan usaha tani berskala kecil dan subsistem, akses petani terhadap permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya banyak petani terlibat kedalam system ijon atau tengkulak. Hal ini mengakibatkan nilai tukar petani tidak signifikan dan akan berdampak pada tingkat kesejahteraan petani.

8. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan Pertanian. Pembangunan sector tidak bias berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak sektor terkait.

9. Belum optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi. Seperti kebanyakan instansi pemerintahan pada umumnya, sumber daya manusia aparat pemerintah masih jauh dari memuaskan. Hal ini disebabkan relative masih terbatasnya kemampuan dan rendahnya etos kerja aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

10. Belum optimalnya pengelolaan unit pelaksana teknis dinas dalam meningkatkan penerimaan PAD.

## B. Tantangan

Tantangan pembangunan Pertanian tahun tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu, serta nilai tambah produk pertanian dengan menciptakan system pertanian yang ramah lingkungan
2. Penggunaan pupuk kimia dan organic secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah
3. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air Pertanian, perbenihan dan pembibitan, kemudahan akses pembiayaan dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil.
4. Perbaikan citra petani dan pertanian agar kembali diminati oleh generasi penerus.
5. Kelembagaan usaha ekonomi produktif bagi petani dan pelaku agribisnis
6. Mendukung ketersediaan kebutuhan pangan, disamping pengembangan komoditas unggulan hortikultura, peternakan dan perkebunan

7. Meningkatkan koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi untuk mencapai kepentingan bersama
8. Meningkatkan kapasitas dan fungsi pengelolaan UPTD

### **C. Peluang**

Ketersediaan sumber daya dan kepastian pasar merupakan hal yang strategis dalam upaya mendorong minat masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian. Dari sisi potensi sumber daya lahan Pertanian yang telah diuraikan diatas, maka secara fisik maupun teknis masih memiliki peluang untuk dikembangkan dalam konteks agribisnis (sektor pertanian).

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Masalah yang umum dihadapi di Kota Kendari terkait dengan pelaksanaan urusan pertanian berkaitan dengan upaya pengembangan sistem pertanian, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi :

1. Pengembangan Pertanian bernilai tambah tinggi (Tanaman Hortikultura) dan pemanfaatan teknologi.
2. Mengembangkan pertanian sebagai RTH untuk menggantikan nilai ekologis yang hilang akibat alih fungsi lahan .

##### **3.2. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga**

Berdasarkan capaian pelayanan yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terakhir oleh Dinas Pertanian Kota Kendari, ditemui masalah-masalah sebagai berikut :

###### **3.2.1. Permasalahan**

1. Menurunnya kualitas lingkungan serta kondisi iklim yang tidak menentu.

Menurunnya produksi pertanian sangat erat dengan perubahan iklim dan berakibat terjadinya gangguan siklus biologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya kekeringan. Dampak lanjutan dari keadaan iklim yang tidak menentu adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati serta munculnya hama dan penyakit tanaman dan hewan.

2. Ketersediaan sarana dan prasarana relatif masih terbatas.

Salah satu sarana pertanian yang saat ini keberadaannya terbatas di Kota Kendari adalah jaringan irigasi teknis serta adanya jaringan irigasi setengah teknis serta swadaya mengalami kerusakan akibat banjir dan erosi. Prasarana usaha tani lain dan pengamanan hutan yang sangat dibutuhkan masyarakat pedagang komoditas pertanian jalan usaha tani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi pergudangan berpendingin udara, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan kandang untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian.

Dari sisi sarana produksi permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/ obat-obatan, alat dan mesin pertanian, belum berkembangnya kelembagaan penyedia sarana produksi.

### 3. Status dan luas kepemilikan lahan

Dari sisi skala penguasaan lahan pertanian di Kota Kendari dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya konservasi lahan untuk pemukiman dan fasilitas umum.

Dari segi status kepemilikan lahan, sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh modal usaha.

### 4. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga kredit usaha tani.

Hal ini diakibatkan tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan.

### 5. Belum optimalnya kelembagaan petani.

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya, sehingga berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, dan belum sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usaha tani. Disisi lain, koperasi usaha tani belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani.

### 6. Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik.

Pola konsumsi pangan masyarakat kota masih didominasi oleh beras. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan beras untuk konsumsi masyarakat akan semakin bertambah, dan apabila keadaan ini terus berlangsung tanpa ada upaya diversifikasi pangan akan mengancam ketahanan pangan.

### 7. Masih rendahnya nilai tukar petani (NTP)

Petani Kota Kendari pada umumnya tidak memiliki modal besar dengan usaha tani berskala kecil dan subsistem, akses petani terhadap permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya banyak petani terlibat kedalam sistem ijon atau tengkulak. Hal ini mengakibatkan nilai tukar petani tidak signifikan dan akan berdampak pada tingkat kesejahteraan petani.

### 8. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian.

Pembangunan pertanian tidak bisa berjalan sendiri, melainkan melibatkan banyak sektor terkait.

### 9. Belum optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi.

Seperti kebanyakan instansi pemerintah pada umumnya, sumber daya manusia aparat pemerintah masih jauh dari memuaskan. Hal ini disebabkan relatif masih



terbatasnya kemampuan dan rendahnya etos kerja aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

10. Belum optimalnya pengelolaan unit pelaksana teknis dinas dalam meningkatkan PAD.

Fasilitas sarana dan prasarana unit pelaksana teknis dinas masih kurang dan belum memadai, sehingga mempengaruhi produktifitas aparat untuk mencapai target PAD. Hal ini juga ditambah oleh keterbatasan jumlah aparat dan kurangnya kualitas sumber daya manusia dari aparat.

### 3.2.2 Tantangan

Tantangan pembangunan pertanian tahun 2023-2026 adalah :

1. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu, serta nilai tambah produk pertanian dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan.
2. Penggunaan pupuk kimia dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah.
3. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air pertanian, perbenihan dan pembibitan
4. Kemudahan akses pembiayaan dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil.
5. Perbaikan citra petani dan pertanian agar kembali diminati oleh generasi penerus.
6. Kelembagaan usaha ekonomi produktif bagi petani dan pelaku agribisnis.
7. Mendukung ketersediaan kebutuhan pangan, disamping pengembangan komoditas unggulan hortikultura, peternakan dan perkebunan..
9. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi untuk mencapai kepentingan bersama
10. Meningkatkan kapasitas dan fungsi pengelolaan UPTD.

### 3.2.3. Peluang

Ketersediaan sumber daya dan kepastian pasar merupakan hal yang strategis dalam upaya mendorong minat masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian. Dari sisi potensi sumber daya lahan pertanian yang telah diuraikan di atas, maka secara fisik maupun teknis masih memiliki peluang untuk dikembangkan dalam konteks agribisnis (sektor pertanian) Hasil identifikasi permasalahan bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kota Kendari dijabarkan pada tabel berikut :

## 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Dinas Pertanian Kota Kendari Tahun Anggaran 2023 mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan sumberdaya manusia didukung keseriusan kekompakan, yang baik semua pihak yakni petani, penyuluh dan keterlibatan pemerintah/instansi teknis.
- b. Eksport sector pertanian dimasa pandemic meningkat, pertanian tetap tangguh dan dapat bertahan, dimana Indonesia mempunyai makanan eksotik nusantara potensi pengembangan pangan industrialisasi.
- c. Tingginya alih fungsi lahan pertanian yang dapat menurunkan nilai ekologis, optimalisasi ketersediaan lahan pertanian termasuk pemanfaatan lahan tidur dan peningkatan program pembangunan pertanian.
- d. Dampak perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan dapat mereduksi hasil pertanian, hal ini terparah oleh tingginya serangan hama penyakit serta ancaman gagal tanam dan panen akibat kesulitan petani mengakses informasi cuaca dan iklim.
- e. Masih tingginya pemakaian zat kimia dalam pengembangan komoditi pertanian, diverifikasi pangan dan inovasi sistem pertanian yang handal sehingga tercipta pembangunan ketahanan pangan yang menunjang peningkatan gizi masyarakat.

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Program kegiatan sasaran jangka menengah merupakan representasi dari Misi Dinas Pertanian yang hendak dicapai pada kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan. Penetapan indikator sasaran kegiatan senantiasa memperhatikan prioritas yang dibutuhkan petani dan pelaku agribisnis, secara jelas disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Meningkatkan produktivitas Pertanian		Persentase peningkatan produksi pertanian	50%	60,10%	60,70%	61,00%	61,30%	61,30%
		1. Peningkatan produksi pertanian	1. Jumlah produksi pertanian tanaman pangan	9.943,8 ton	9.962 ton	9.981 ton	10.000 ton	10.020 ton	39.963 ton
			2. Jumlah produksi pertanian tanaman perkebunan dan hortikultura	1.337,3 ton	1.339 ton	1.341 ton	1.343 ton	1.345 ton	6.705,3 ton
			3. Jumlah produksi peternakan	3.807 ton	3.814 ton	3.821 ton	3.828 ton	3.835 ton	15.298 ton

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Kebijakan pembangunan pertanian di Kota Kendari selama 4 tahun kedepan tetap masih berprinsip pada revitalisasi pertanian, dalam arti pembangunan pertanian dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran, penciptaan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Kendari. Beberapa permasalahan sering kali timbul dalam menghadapi berbagai perubahan akibat globalisasi antara lain : semakin terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan, meningkatnya tuntutan kebijakan pertanian yang berlandaskan mekanisme pasar dan semakin berperannya selera konsumen.

Adanya berbagai permasalahan tersebut di atas, memacu pembangunan pertanian di Kota Kendari untuk lebih mengoptimalkan potensi melalui peningkatan produktifitas.

Tabel 5. Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
I.	Meningkatkan produktivitas pertanian	Peningkatan produksi pertanian	<div>1. Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana pertanian</div> <div>2. Pengawalan dan pendampingan kelompok tani yang mendapat bantuan dari pemerintah</div> <div>3. Pengelolaan kelompok tani secara terpadu (integrasi berbasis teknologi spesifik lokal)</div> <div>4. Pengamanan produk melalui peningkatan dan pencegahan terhadap OPT, penanganan panen dan pasca panen</div> <div>5. Peningkatan pola tanam dan intensitas tanam melalui optimasi lahan, perbaikan irigasi dalam pemanfaatan lahan kering atau tidur</div> <div>6. Pengembangan usaha ternak</div> <div>7. Adanya aturan tentang larangan memotong hewan yang bunting</div> <div>8. Pemberian nutrisi yang tepat dan efisien kepada hewan penghasil daging dan telur</div>	<div>1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian</div> <div>2. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian</div> <div>3. Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian</div>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta Pendanaan Dinas Pertanian Kota Kendari dapat ditetapkan indikator kinerja yang memberi gambaran ukuran pencapaian visi dan misi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan periode 2023-2026, secara jelas dijabarkan pada tabel 6.1

Tabel 6.1  
Indikasi Rencana Program Serta Pendanaan Dinas Pertanian Kota Kendari

Tujuan	Sasaran		Kode Rekening				Program dan Kegiatan/Sub Bagian	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir		PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab
										2023		2024		2025		2026				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)
Peningkatan produktivitas pertanian	Meningkatkan Hasil produksi Pertanian	3	27	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	16.285.000.000	100%	17.110.870.000	100%	17.367.533.050	100%	17.628.046.046	100%	68.391.449.096	DINAS PERTANIAN
		3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	43.000.000	100%	61.870.000	100%	62.798.050	100%	63.740.021	100%	231.408.071	
		3	27	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Dokumen Renja	21.683.125	2 Dok	22.000.000	2 Dok	40.555.000	2 Dok	41.163.325	2 Dok	41.780.775	10 Dok	145.499.100	
		3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKA	5.000.000	1 Dok	5.500.000	1 Dok	5.582.500	1 Dok	5.666.238	1 Dok	5.751.231	5 Dok	22.499.969	
		3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen DPA	5.000.000	2 Dok	5.500.000	2 Dok	5.582.500	2 Dok	5.666.238	2 Dok	5.751.231	10 Dok	22.499.969	
		3	27	01	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen Lakip	10.000.000	1Dok	10.000.000	1Dok	10.150.000	1Dok	10.302.250	1Dok	10.456.784	5 Dok	40.909.034	
		3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan	Presentase Cakupan Administrasi Keuangan Perangkatat Daerah	100%	100%	12.022.000.000	100%	12.202.330.000	100%	12.385.364.950	100%	12.571.145.424	100%	49.180.840.374	
		3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58.617.981.280	116 Org	12.000.000.000	118 Org	12.180.000.000	120 Org	12.362.700.000	122 Org	12.548.140.500	600 Org	49.090.840.500	
		3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan keuangan	21.683.000	5 Laporan	22.000.000	5 Laporan	22.330.000	5 Laporan	22.664.950	5 Laporan	23.004.924	25 Laporan	89.999.874	

		3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100%	49.000.000	100%	49.735.000	100%	50.481.025	100%	51.238.240	100%	200.454.265	
		3	27	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah atau PERANGKAT DAERAH	48.506.250	1 Dok	49.000.000	1 Dok	49.735.000	1 Dok	50.481.025	1 Dok	51.238.240	5 Dok	200.454.265	
		3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	350.000.000	100 %	868.620.000	100%	881.649.300	100%	894.874.040	100%	2.995.143.340	
		3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	422.820.938	125 Paket	215.000.000	125 Paket	481.595.000	125 Paket	488.818.925	125 Paket	496.151.209	625 Paket	1.681.565.134	
		3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100.000.000	(Diklat pim III (4 Org), Diklat pim IV (25 Org), Diklat Fungsional (50 Org) Diklat Teknis (5 Org)	85.000.000	(Diklat pim III (4 Org), Diklat pim IV (25 Org), Diklat Fungsional (50 Org) Diklat Teknis (5 Org)	236.275.000	(Diklat pim III (4 Org), Diklat pim IV (25 Org), Diklat Fungsional (50 Org) Diklat Teknis (5 Org)	239.819.125	(Diklat pim III (4 Org), Diklat pim IV (25 Org), Diklat Fungsional (50 Org) Diklat Teknis (5 Org)	243.416.412	(Diklat pim III (4 Org), Diklat pim IV (25 Org), Diklat Fungsional (50 Org) Diklat Teknis (5 Org)	804.510.537	
		3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	150.750.000	10 Orang	153.011.250	10 Orang	155.306.419	50 Orang	509.067.669	
		3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100%	560.500.000	100%	618.907.500	100%	628.191.113	100%	637.613.979	100%	2.445.212.592	
		3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik dan bangunan kantor yang disediakan	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.150.000	1 Paket	10.302.250	1 Paket	10.456.784	5 Paket	40.909.034	

		3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	35.000.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	35.525.000	1 Paket	36.057.875	1 Paket	36.598.743	5 Paket	143.181.618	
		3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.225.000	1 Paket	15.453.375	1 Paket	15.685.176	5 Paket	61.363.551	
		3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	101.500.000	1 Paket	103.022.500	1 Paket	104.567.838	5 Paket	409.090.338	
		3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	75.000.000	1 Paket	75.000.000	1 Paket	126.125.000	1 Paket	128.016.875	1 Paket	129.937.128	5 Paket	459.079.003	
		3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.375.000	1 Paket	25.755.625	1 Paket	26.141.959	5 Paket	102.272.584	
		3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	15.000.000	1 Paket	15.500.000	1 Paket	15.732.500	1 Paket	15.968.488	1 Paket	16.208.015	5 Paket	63.409.002	
		3	27	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.525.000	1 Laporan	36.057.875	1 Laporan	36.598.743	5 Laporan	143.181.618	
		3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PERANGKAT DAERAH	350.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	253.750.000	1 Laporan	257.556.250	1 Laporan	261.419.594	5 Laporan	1.022.725.844	
		3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	100%	100%	2.025.500.000	100%	2.055.882.500	100%	2.086.720.738	100%	2.118.021.549	100%	8.286.124.786	
		3	27	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1.250.000.000	5 Unit	1.000.000.000	5 Unit	1.015.000.000	5 Unit	1.030.225.000	5 Unit	1.045.678.375	25 Unit	4.090.903.375	
		3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	125.000.000	25 Unit	125.500.000	25 Unit	127.382.500	25 Unit	129.293.238	25 Unit	131.232.636	125 Unit	513.408.374	
		3	27	01	2.07	05	Pengadaan Meubel	Jumlah paket pengadaan meubel yang disediakan	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	101.500.000	1 Paket	103.022.500	1 Paket	104.567.838	5 Paket	409.090.338	



		3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	250.000.000	15 Unit	250.000.000	15 Unit	253.750.000	15 Unit	257.556.250	15 Unit	261.419.594	75 Unit	1.022.725.844	
		3	27	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	500.000.000	1 Unit	550.000.000	2 Unit	558.250.000	2 Unit	566.623.750	2 Unit	575.123.106	9 Unit	2.249.996.856	
		3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	440.000.000	100 %	446.600.000	100%	453.299.000	100%	460.098.485	100%	1.799.997.485	
		3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.150.000	1 Laporan	10.302.250	1 Laporan	10.456.784	5 Laporan	40.909.034	
		3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	203.000.000	1 Laporan	206.045.000	1 Laporan	209.135.675	5 Laporan	818.180.675	
		3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	101.500.000	1 Laporan	103.022.500	1 Laporan	104.567.838	5 Laporan	409.090.338	
		3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	129.463.950	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	131.950.000	1 Laporan	133.929.250	1 Laporan	135.938.189	5 Laporan	531.817.439	
		3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	795.000.000	100 %	806.925.000	100%	819.028.875	100%	831.314.308	100%	3.252.268.183	
		3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas perorangan	150.000.000	4 Unit	150.000.000	4 Unit	152.250.000	4 Unit	154.533.750	4 Unit	156.851.756	20 Unit	613.635.506	

		3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	74 Unit	200.000.000	74 unit	203.000.000	74 Unit	206.045.000	74 Unit	209.135.675	370 Unit	818.180.675	
		3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50.000.000	10 Unit	55.000.000	11 Unit	55.825.000	12 Unit	56.662.375	13 Unit	57.512.311	60 Unit	224.999.686	
		3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	135.000.000	5 Unit	135.000.000	6 Unit	137.025.000	7 Unit	139.080.375	8 Unit	141.166.581	35 Unit	552.271.956	
		3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	130.000.000	5 Unit	135.000.000	5 Unit	137.025.000	5 Unit	139.080.375	5 Unit	141.166.581	25 Unit	552.271.956	
		3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	100.000.000	5 Unit	120.000.000	5 Unit	121.800.000	5 Unit	123.627.000	5 Unit	125.481.405	5 Unit	490.908.405	
		3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
		3	27	02			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan mutu dan jumlah sarana pertanian	65%	67%	8.638.530.028	70%	8.768.107.978	80%	8.899.629.598	90%	9.033.124.042	100%	35.339.391.647	DINAS PERTANIAN
		3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan peningkatan produksi pertanian	65%	67%	6.318.400.000	70%	6.413.176.000	80%	6.509.373.640	90%	6.607.014.245	100%	25.847.963.885	
			27	02	2	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	5.675.000.000	4 Laporan	6.318.400.000	4 Laporan	6.413.176.000	4 Laporan	6.509.373.640	4 Laporan	6.607.014.245	80 Laporan	25.847.963.885	

		3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan peningkatan produksi pertanian	65%	67%	500.000.000	70%	507.500.000	80%	515.112.500	90%	522.839.188	100%	2.045.451.688	
		3	27	02	2	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pemanfaatan SDG hewan/tanaman	100.000.000	5 Dokum en	500.000.000	5 Doku men	507.500.000	5 Doku men	515.112.500	5 Doku men	522.839.188	25 Doku men	2.045.451.688	
		3	27	02	2		Peningkatan mutu peredaran benih/bibit Ternak dan Tanaman Pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota	Cakupan peningkatan produksi peternakan	65%	67%	100.000.000	70%	101.500.000	80%	103.022.500	90%	104.567.838	100%	409.090.338	
		3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah laporan pengawasan mutu benih/bibit ternak	50.000.000	1 Lapora n	50.000.000	2 Lapor an	50.750.000	1 Lapor an	51.511.250	1 Lapor an	52.283.919	25 Lapor an	204.545.169	
		3	27	02	2.03	02	Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak	Jumlah laporan pengawasan peredaran benih/ bahan pakan ternak	50.000.000	1 Lapora n	50.000.000	2 Lapor an	50.750.000	1 Lapor an	51.511.250	1 Lapor an	52.283.919	25 Lapor an	204.545.169	
		3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan Ditingkat Pengecer	Cakupan pemeriksaan dan keamanan peredaran obat hewan	65%	67%	50.000.000	70%	50.750.000	80%	51.511.250	90%	52.283.919	100%	204.545.169	
		3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	50.000.000	2 Lapora n	50.000.000	1 Lapor an	50.750.000	1 Lapor an	51.511.250	1 Lapor an	52.283.919	25 Lapor an	204.545.169	
		3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan peningkatan mutu Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan ternak dalam daerah Kabupaten/Kota	65%	67%	400.000.000	70%	304.500.000	80%	309.067.500	90%	313.703.513	100%	1.227.271.013	
		3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang terjamin dan beredar	500.000.000	5.000 Ekor	300.000.000	5.500 Ekor	304.500.000	6.000 Ekor	309.067.500	6.500 Ekor	313.703.513	30.000 Ekor	1.227.271.013	
		3	27	02	2.05	04	Penjaminan peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, bahan pakan/pakan yang beredar	250.000.000	2 ton	50.000.000	1 ton	50.750.000	1 ton	51.511.250	1 ton	52.283.919	25 ton	204.545.169	

		3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak atau hijauan pakan ternak yang tersedia	50.000.000	2 ton	50.000.000	1 ton	50.750.000	1 ton	51.511.250	1 ton	52.283.919	25 ton	204.545.169	
		3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Cakupan peningkatan produksi peternakan	65%	67%	1.270.130.028	70%	1.289.181.978	80%	1.308.519.708	90%	1.328.147.504	100%	5.195.979.218	
		3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah provinsi Lain	Jumlah benih atau bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	1.170.130.028	16.775 Ekor	1.270.130.028	17,000 Ekor	1.289.181.978	17.400 Ekor	1.308.519.708	18.000 Ekor	1.328.147.504	88.175 Ekor	5.195.979.218	
		3	27	03			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan mutu dan jumlah prasarana pertanian	75%	80%	14.580.000.000	85%	14.798.700.000	90%	15.020.680.500	95%	15.245.990.708	100%	59.645.371.208	
		3	27	03	2		Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya fungsi prasarana pertanian	75%	80%	450.000.000	85%	456.750.000	90%	463.601.250	95%	470.555.269	100%	1.840.906.519	
		3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah dokumen peta lahan pangan	150.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	203.000.000	1 Dokumen	206.045.000	1 Dokumen	209.135.675	5 Dokumen	818.180.675	
		3	27	03	2	04	Penyusunan Master Plan Pengembangan Prasarana Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah dokummen master plan pengembangan sarana prasarana kawasan dan komoditas perkebunan	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	253.750.000	1 Dokumen	257.556.250	1 Dokumen	261.419.594	5 Dokumen	1.022.725.844	
		3	27	03	2		Pembangunan Prasarana pertanian	Cakupan peningkatan fungsi prasarana pertanian	75%	80%	14.130.000.000	85%	14.341.950.000	90%	14.557.079.250	95%	14.775.435.439	100%	57.804.464.689	
		3	27	03	2.02	01	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Usahatani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	512.000.000	3 Unit	550.000.000	3 Unit	558.250.000	3 Unit	566.623.750	4 Unit	575.123.106	65 Unit	2.249.996.856	
		3	27	03	2	02	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah unit embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	100.000.000	1 Unit	200.000.000	2 Unit	203.000.000	1 Unit	206.045.000	1 Unit	209.135.675	25 Unit	818.180.675	

RENSTRA 2023–2026																				
		3	27	03	2	03	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usahatani	Jumlah unit jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	512.000.000	2 Unit	1.000.000.000	2 Unit	1.015.000.000	1 Unit	1.030.225.000	1 Unit	1.045.678.375	30 Unit	4.090.903.375	
		3	27	03	2	04	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Dam Parit	Jumlah unit dam parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	100.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	203.000.000	2 Unit	206.045.000	2 Unit	209.135.675	10 Unit	818.180.675	
		3	27	03	2	05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Longs Storage	Jumlah Longs Storage yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	200.000.000	2 Unit	600.000.000	2 Unit	609.000.000	2 Unit	618.135.000	2 Unit	627.407.025	10 Unit	2.454.542.025	
		3	27	03	2.02	07	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah unit rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	250.000.000	2 Unit	380.000.000	2 Unit	385.700.000	2 Unit	391.485.500	1 Unit	397.357.783	35 Unit	1.554.543.283	
		3	27	03	2	08	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Unit Balai Penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1.200.000.000	3 Unit	1.200.000.000	3 Unit	1.218.000.000	3 Unit	1.236.270.000	4 Unit	1.254.814.050	65 Unit	4.909.084.050	
		3	27	03	2	09	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Jumlah unit prasarana pertanian lainnya yang dibangun	1.000.000.000	2 Unit	10.000.000.000	1 Unit	10.150.000.000	1 Unit	10.302.250.000	1 Unit	10.456.783.750	25 Unit	40.909.033.750	
		3	27	04			Program Pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan kualitas kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	60%	65%	900.000.000	75%	913.500.000	80%	927.202.500	90%	941.110.538	90%	3.681.813.038	
		3	27	04	2.01		Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	Cakupan peningkatan kualitas kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	60%	65%	400.000.000	75%	406.000.000	80%	412.090.000	90%	418.271.350	100%	1.636.361.350	

		3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Jumlah laporan wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	100.000.000	3 Laporan	250.000.000	2 Laporan	253.750.000	2 Laporan	257.556.250	3 Laporan	261.419.594	50 Laporan	1.022.725.844	
		3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan wilayah yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten	50.000.000	2 Laporan	150.000.000	1 Laporan	152.250.000	1 Laporan	154.533.750	1 Laporan	156.851.756	25 Laporan	613.635.506	
		3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan	60%	65%	100.000.000	75%	101.500.000	80%	103.022.500	90%	104.567.838	100%	409.090.338	
		3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah kabupaten/kota	75.000.000	2 laporan	100.000.000	1 laporan	101.500.000	1 laporan	103.022.500	1 laporan	104.567.838	25 laporan	409.090.338	
		3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan peningkatan pengelolaan dan pelayanan jasa laboratorim dan jasa medik veteriner	60%	65%	200.000.000	75%	203.000.000	80%	206.045.000	90%	209.135.675	100%	818.180.675	
		3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah laporan pelayanan jasa laboratorium	25.000.000	2 laporan	100.000.000	1 laporan	101.500.000	1 laporan	103.022.500	1 laporan	104.567.838	25 laporan	409.090.338	
		3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah laporan pelayanan jasa medik veteriner	25.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	101.500.000	1 laporan	103.022.500	1 laporan	104.567.838	5 laporan	409.090.338	
		3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan peningkatan penerapan dan pengawasan persyaratn teknis kesehatan masyarakat veteriner	60%	65%	200.000.000	75%	203.000.000	80%	206.045.000	90%	209.135.675	100%	818.180.675	

		3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah laporan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	50.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	101.500.000	1 Laporan	103.022.500	1 Laporan	104.567.838	5 Laporan	409.090.338	
		3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah laporan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	50.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	101.500.000	1 Laporan	103.022.500	1 Laporan	104.567.838	5 Laporan	409.090.338	
		3	27	05			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase peningkatan pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	50%	65%	60.913.523	75%	61.827.226	85%	62.754.634	90%	63.695.954	90%	249.191.337	
		3	27	05	2		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan peningkatan mutu dan jumlah produksi pertanian	50%	65%	60.913.523	75%	61.827.226	85%	62.754.634	90%	63.695.954	100%	249.191.337	
		3	27	05	2	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luas serangan OPT pertanian yang dikendalikan	35.000.000	3 Hektar	60.913.523	3 Hektar	61.827.225,85	4 Hektar	62.754.634	5 Hektar	63.695.954	75 Hektar	249.191.337	
		3	27	06			Program Perijinan Usaha Pertanian	Persentase peningkatan Perijinan Usaha Pertanian	75%	77%	160.502.766	80%	162.910.307	85%	165.353.962	90%	167.834.272	100%	656.601.307	
		3	27	06	2.01		Penerbitan ijin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan peningkatan Perijinan Usaha Pertanian	75%	77%	160.502.766	80%	162.910.307	85%	165.353.962	90%	167.834.272	100%	656.601.307	
		3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan pengawasan Penerapan Ijin Usaha Pertanian	Jumlah laporan izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	136.427.351	3 Laporan	160.502.766	3 Laporan	162.910.307	3 Laporan	165.353.962	2 Laporan	167.834.272	55 Laporan	656.601.307	

		3	27	07			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas SDM Penyuluh dan Petani	75%	80%	3.030.000.000	85%	3.075.450.000	90%	3.121.581.750	95%	3.168.405.476	100%	12.395.437.226	
		3	27	07	2.01		Pelaksanaan penyuluhan Pertanian	Cakupan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani	75%	80%	3.030.000.000	85%	3.075.450.000	90%	3.121.581.750	95%	3.168.405.476	100%	12.395.437.226	
		3	27	07	2.01	01	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah unit kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	500.000.000	7 Unit	1.600.000.000	2 Unit	1.624.000.000	2 Unit	1.648.360.000	1 Unit	1.673.085.400,00	35 Unit	6.545.445.400	
		3	27	07	2.01	02	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	250.000.000	4 Unit	825.000.000	4 Unit	837.375.000	4 Unit	849.935.625	3 Unit	862.684.659,38	75 Unit	3.374.995.284	
		3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah unit sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	200.000.000	5 Unit	300.000.000	5 Unit	304.500.000	5 Unit	309.067.500	5 Unit	313.703.512,50	100 Unit	1.227.271.013	
		3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah unit badan usaha milik petani yang dibentuk	75.000.000	2 Unit	125.000.000	3 Unit	126.875.000	3 Unit	128.778.125	3 Unit	130.709.796,88	55 Unit	511.362.922	
		3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah unit sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi	100.000.000	2 Unit	180.000.000	3 Unit	182.700.000	3 Unit	185.440.500	2 Unit	188.222.107,50	45 Unit	736.362.608	





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Tabel 7.1    Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase pertumbuhan PDRB	2%	3%	3,5%	4%	4,5%	4,5%
2	Pendapatan perkapita (RP)	56.781.397	59.941.119	62.404.481	64.969.080	67.639.074	67.639.074
3	Gini Rasio	0,373%	0,369%	0,367%	0,365%	0,383%	0,383%
4	Angka Kemiskinan	4,33%	4,30%	4,27%	4,25%	4,23%	4,23%

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2023-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pertanian. Karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian rencana Strategis ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan visi misi daerah yang akan dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pertanian dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good government melalui Rencana Tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian.

Kendari, Februari 2022

Kepala Dinas,



Ir. H. ST. GANEF, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19630918 199103 2 003